

Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Taiwan dalam konteks Kebijakan Arah Selatan Baru Taiwan

Nguyen Minh Tri¹, Nguyen Le Tam²

^{1,2}Faculty of International Relations & Communications, Ho Chi Minh City University of Foreign Languages – Information Technology, Vietnam.

Corresponding author: Nguyen Minh Tri

Email: trinm@hufliit.edu.vn

Abstract

This study analyzes the bilateral relations between Indonesia and Taiwan within the framework of the New Southbound Policy (NSP) launched by the Tsai Ing-wen administration in 2016. The NSP represents Taiwan's strategic effort to diversify its economic and diplomatic engagement beyond mainland China by strengthening cooperation with Southeast Asia, South Asia, Australia, and New Zealand. Using a qualitative descriptive-analytical approach and a multidisciplinary theoretical framework that combines strategic realism and soft power theory, this research examines how Indonesia and Taiwan navigate complex interdependence despite the absence of formal diplomatic relations within the One China Policy framework. Data were collected through an extensive review of academic literature, policy documents, trade statistics, and investment reports. The findings indicate that Indonesia occupies a pivotal position in the NSP due to its strategic maritime geography, demographic weight, and "Free and Active" foreign policy orientation, which facilitate substantial cooperation in non-political sectors. Economic evidence demonstrates a strong growth trajectory, with bilateral trade surpassing USD 14 billion in 2022 and significant Taiwanese foreign direct investment in strategic Indonesian industries. The study also identifies a persistent soft power gap in educational exchanges, characterized by asymmetrical student mobility and limited academic engagement with Taiwan in Indonesia. Furthermore, Indonesian migrant workers and halal tourism emerge as important grassroots mechanisms that strengthen people-to-people connectivity and socio-cultural relations. The study concludes that the long-term sustainability of Indonesia-Taiwan relations depends on the effective utilization of non-political cooperation channels that align with Indonesia's development priorities, including the Golden Indonesia Vision 2045, while adapting to evolving regional strategic competition.

Keywords: International relations; Diplomatic relations; New Southbound Policy; Indonesia; Taiwan

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hubungan bilateral antara Indonesia dan Taiwan dalam kerangka New Southbound Policy (NSP) yang diluncurkan oleh pemerintahan Tsai Ing-wen pada tahun 2016. NSP merupakan upaya strategis Taiwan untuk mendiversifikasi keterlibatan ekonomi dan diplomatiknya di luar Tiongkok daratan melalui penguatan kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis serta kerangka teoretis multidisiplin yang menggabungkan realisme strategis dan teori soft power, penelitian ini mengkaji bagaimana Indonesia dan Taiwan membangun interdependensi yang kompleks meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal akibat penerapan Kebijakan Satu Tiongkok. Data dikumpulkan melalui telaah pustaka yang komprehensif terhadap literatur akademik, dokumen kebijakan, statistik perdagangan, dan laporan investasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi yang sangat penting dalam NSP karena geografi maritimnya yang strategis, besarnya populasi, serta orientasi politik luar negeri "Bebas dan Aktif" yang memungkinkan terjalannya kerja sama substansial di sektor-sektor non-politik. Bukti ekonomi memperlihatkan tren pertumbuhan yang kuat, dengan nilai perdagangan bilateral melampaui USD 14 miliar pada tahun 2022 serta investasi asing langsung Taiwan yang signifikan di berbagai industri strategis Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan soft power dalam pertukaran pendidikan yang ditandai oleh mobilitas mahasiswa yang asimetris dan keterlibatan akademik mengenai Taiwan yang masih terbatas di Indonesia. Selain itu, pekerja migran Indonesia dan pariwisata halal muncul sebagai mekanisme akar rumput yang penting dalam memperkuat konektivitas antarmasyarakat dan hubungan sosial-budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan hubungan Indonesia-Taiwan bergantung pada pemanfaatan saluran kerja sama non-politik yang selaras dengan prioritas pembangunan Indonesia, termasuk Visi Indonesia Emas 2045, sembari beradaptasi dengan dinamika persaingan strategis di kawasan.

Kata Kunci: Hubungan internasional; Hubungan diplomatik antara; Kebijakan Arah Selatan Baru; Indonesia; Taiwan

Pendahuluan

Sejak inaugurasi pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen dari Democratic Progressive Party (DPP) pada bulan Mei 2016, arsitektur kebijakan luar negeri dan ekonomi makro Taiwan (Republic of China/ROC) mengalami reorientasi struktural yang fundamental melalui peluncuran *New Southbound Policy* (NSP) atau Kebijakan Arah Selatan Baru (Tonny, 2024a, p. 135). Kebijakan ini secara resmi diimplementasikan pada bulan September 2016 sebagai kerangka strategis besar untuk memposisikan ulang Taiwan di lanskap geopolitik Asia dan mereduksi ketergantungan ekonomi yang sangat asimetris terhadap Republik Rakyat Tiongkok (ROC). NSP dirancang untuk memperluas dan memperdalam konektivitas multidimensi dengan 18 negara mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik, yang secara spesifik mencakup sepuluh negara anggota ASEAN, enam negara di Asia Selatan (termasuk India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, dan Bhutan), serta Australia dan Selandia Baru (Mumin & Chattaraj, 2017). Dalam konstelasi 18 negara sasaran tersebut, Republik Indonesia menempati posisi yang sangat krusial dan sentral, mengingat kapasitas demografis, ukuran ekonomi, dan pengaruh diplomatiknya sebagai jangkar utama di Asia Tenggara (CRIF, 2024).

Secara konseptual dan historis, Kebijakan Arah Selatan Baru mewakili pergeseran paradigma yang radikal dari kebijakan pendahulunya, yakni kebijakan “Go South” yang diinisiasi pada era kepemimpinan Presiden Lee Teng-hui (1988–2000) (Tonny, 2024b). Jika kebijakan “Go South” pada dekade 1990-an secara eksklusif digerakkan oleh insentif ekonomi murni, rasionalitas bisnis, dan upaya mitigasi risiko investasi modal dari daratan Tiongkok, NSP beroperasi di bawah kerangka filosofis yang jauh lebih holistik (Ratih, 2023). NSP meletakkan fokus utamanya pada pendekatan yang berpusat pada manusia (*people-centred*). Melalui paradigma baru ini, kebijakan luar negeri Taiwan tidak lagi sekadar mendefinisikan kawasan Asia Tenggara sebagai basis produksi manufaktur berbiaya rendah (*sweatshops*) atau sekadar pasar ekspor komoditas, melainkan sebagai ruang vital untuk menjalin kolaborasi ekonomi, pertukaran sumber daya manusia (*people-to-people exchanges*), pembagian sumber daya (*resource sharing*), dan penguatan tautan institusional regional (Himawan, 2022).

Lebih jauh lagi, melalui kacamata teori konstruktivisme dalam diskursus Hubungan Internasional, NSP berfungsi sebagai instrumen esensial bagi Taiwan untuk menegaskan kembali dan merekonstruksi identitas regionalnya. Selama beberapa dekade, diskusi mengenai identitas Taiwan hampir secara eksklusif berpusat pada identitas domestiknya,

yang sering kali terperangkap dalam dikotomi politik antara identitas “Tiongkok” dan identitas “Taiwan” (Tonny, 2024b). Namun, NSP menyediakan ruang diskursif dan operasional baru untuk membahas identitas regional Taiwan. Dengan menitikberatkan pada hubungan kolaboratif dengan tetangga-tetangga selatannya, Asia Tenggara kini dipandang sebagai liyan yang signifikan yang membantu membentuk dan melegitimasi identitas peran Taiwan. Identitas regional yang dibangun di bawah payung NSP ini mengintegrasikan identitas personal dan identitas peran, serta mencakup dimensi domestik maupun regional secara simultan, memosisikan Taiwan sebagai aktor demokrasi modern, pelopor teknologi, dan mitra pembangunan yang konstruktif di dalam komunitas Asia (Himawan, 2022).

Artikulasi NSP juga dapat dipahami secara komprehensif sebagai manifestasi mutakhir dari proyeksi kekuatan lunak (*soft power*) Taiwan di panggung internasional. Mengadaptasi konsep fundamental *soft power* yang dicetuskan oleh Joseph Nye, serta elaborasi spesifik mengenai kekuatan lunak Taiwan oleh cendekiawan Lin Bih-jaw, kebijakan ini didesain untuk mengeksplorasi teknologi tingkat tinggi dan inovasi pengetahuan sebagai sumber daya lunak utama (Karl, 2025). Proyeksi ini bertujuan menembus batas-batas geopolitik yang selama ini memenjarakan diplomasi formal Taiwan. Di Indonesia, implementasi NSP melampaui mekanisme diplomasi antarnegara (*state-to-state relations*) konvensional yang secara permanen terhambat oleh absennya hubungan diplomatik resmi (Dama & Ali, 2022). Sebagai gantinya, pendekatan ini menitikberatkan pada perluasan dan penguatan interaksi politik transnasional yang melibatkan jaringan aktor non-negara secara masif, seperti komunitas akademik, himpunan mahasiswa, kelompok pekerja migran, entitas masyarakat sipil, dan asosiasi bisnis multinasional (Ratih, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan Indonesia–Taiwan dalam kerangka NSP dari berbagai perspektif. Dama dan Ali (2022) menyoroti hubungan Indonesia–Taiwan melalui konsep *complex interdependence* dan menunjukkan bahwa kerja sama kedua pihak tetap berkembang meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Ratih (2023) menganalisis implementasi NSP di Indonesia melalui perspektif transnasional dan menekankan pentingnya pendekatan *people-centred* dalam membangun konektivitas antarmasyarakat. Sementara itu, Tonny (2024b) mengkaji NSP sebagai instrumen pembentukan identitas regional Taiwan, sedangkan Tonny (2025) secara khusus membahas diplomasi pendidikan Taiwan terhadap Indonesia dan menemukan adanya hubungan yang bersifat asimetris dalam mobilitas mahasiswa dan produksi pengetahuan

akademik.

Meskipun studi-studi tersebut telah memberikan kontribusi penting, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada satu dimensi tertentu, seperti interdependensi politik-ekonomi, diplomasi pendidikan, identitas regional, atau konektivitas masyarakat. Hingga saat ini masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan berbagai dimensi utama hubungan Indonesia–Taiwan, meliputi ekonomi, pendidikan, migrasi tenaga kerja, budaya, dan pariwisata, dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak mengombinasikan perspektif realisme strategis dan teori *soft power* untuk menjelaskan bagaimana hubungan non-diplomatik dapat tetap berkelanjutan di tengah keterbatasan politik yang ditimbulkan oleh Kebijakan Satu Tiongkok. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyajikan analisis multidimensional mengenai hubungan Indonesia–Taiwan dalam kerangka NSP melalui sintesis antara kepentingan strategis, interdependensi ekonomi, dan mekanisme *soft power* yang beroperasi pada tingkat masyarakat. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperluas literatur mengenai NSP, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberlanjutan hubungan bilateral tanpa pengakuan diplomatik formal.

Laporan riset ini menyajikan analisis yang amat mendalam, eksklusif, dan bernuansa mengenai lanskap hubungan bilateral Indonesia–Taiwan di bawah payung strategis NSP. Investigasi akademis dan strategis ini difokuskan pada penguraian dinamika geopolitik yang membatasi sekaligus memfasilitasi hubungan kedua entitas, asimetri yang mengakar dalam pertukaran sosio-kultural dan pendidikan. Melalui sintesis data empiris mutakhir dan penerapan kerangka teoretis multidisiplin yang secara fundamental mendefinisikan sifat dasar interdependensi kompleks antara Taiwan dan Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk mengkaji dinamika hubungan bilateral Indonesia–Taiwan dalam kerangka NSP. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses, makna, dan interaksi yang membentuk hubungan kedua pihak dalam konteks keterbatasan hubungan diplomatik formal.

Data penelitian sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) (Dimas et al., 2022; Jackie et al., 2020). Sumber data meliputi: (1) dokumen kebijakan resmi Pemerintah Taiwan dan Indonesia, termasuk publikasi Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) dan Kantor

Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei; (2) laporan statistik perdagangan dan investasi dari lembaga pemerintah serta organisasi ekonomi terkait; (3) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi, buku akademik, disertasi, dan laporan penelitian yang membahas hubungan Indonesia–Taiwan, diplomasi pendidikan, pekerja migran, dan *soft power*; serta (4) laporan media dan publikasi institusi yang relevan untuk melengkapi data empiris terkini.

Pemilihan periode data 2016–2025 dilakukan karena NSP mulai diimplementasikan secara resmi pada tahun 2016 sehingga periode tersebut memungkinkan peneliti mengevaluasi perkembangan hubungan Indonesia–Taiwan setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Data perdagangan dan investasi dipilih karena merupakan indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat interdependensi ekonomi kedua pihak. Sementara itu, data mengenai pendidikan, pekerja migran, dan pariwisata digunakan untuk menilai efektivitas strategi *soft power* Taiwan dalam memperkuat hubungan antarmasyarakat.

Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan tiga kriteria, yaitu relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas lembaga penerbit, dan keterkinian data. Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber (Arias Valencia, 2022; Carter et al., 2014; Meydan & Akkaş, 2024), yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen pemerintah, publikasi akademik, dan laporan statistik resmi. Selain itu, peneliti melakukan cross-check terhadap data kuantitatif seperti nilai perdagangan dan investasi melalui lebih dari satu sumber untuk memastikan konsistensi informasi.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) (Klaus, 2019; Lyhne et al., 2025) dan interpretasi kritis. Data yang telah dikumpulkan dikategorikan ke dalam tiga tema utama, yaitu kerja sama ekonomi, pendidikan dan pertukaran talenta, serta budaya dan pariwisata. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan perspektif realisme strategis (Doeser & Frantzen, 2022) dan teori *soft power* (Nye, 2023) untuk menjelaskan bagaimana saluran-saluran non-politik berkontribusi terhadap keberlanjutan hubungan Indonesia–Taiwan di tengah absennya hubungan diplomatik formal.

Hasil dan Pembahasan

Lokasi Strategis Indonesia

Posisi Indonesia sebagai mitra kunci dalam NSP tidak lepas dari peran geopolitik sentralnya di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai salah satu pendiri dan anggota ASEAN yang paling berpengaruh, Indonesia secara konsisten mengejar kebijakan luar negeri

“Bebas dan Aktif” (Kuik, 2022, hlm. 207). Prinsip ini mengamanatkan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, dengan tetap independen dan tidak memihak terhadap blok kekuatan besar mana pun (Pentasari, 2024). Dalam konteks persaingan strategis yang semakin tajam antara Amerika Serikat dan China, posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang tidak terikat aliansi menjadikannya mitra yang sangat menarik (Laksmiana, 2022, hlm. 47). Bagi Taiwan yang sedang menavigasi lanskap geopolitik yang kompleks, postur kebijakan luar negeri Indonesia menghadirkan peluang. Indonesia dipandang sebagai negara yang menyeimbangkan yang dapat diajak untuk bekerja sama secara pragmatis tanpa terseret ke dalam dinamika konfrontasi kekuatan besar.

Signifikansi strategis Indonesia juga terletak pada geografi maritimnya (Rustam, 2020). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menguasai beberapa jalur laut paling vital untuk perdagangan global, termasuk Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok (Latunrung & Nugraha, 2025; Octavian et al., 2020). Bagi Taiwan, yang ekonominya sangat bergantung pada perdagangan maritim, stabilitas dan keamanan di koridor laut ini memiliki kepentingan strategis yang tidak dapat dinegosiasikan (Tang, 2016). Di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan potensi eskalasi konflik yang dapat mengganggu jalur pelayaran, menjaga hubungan baik dengan Indonesia sebagai “penjaga gerbang” maritim di selatan menjadi semakin krusial (Syailendra, 2025). Kemitraan yang kuat dengan Indonesia dapat membantu Taiwan mengurangi risiko geopolitik terkait keamanan maritim di kawasan ini.

Paradoksnya, kombinasi prinsip “Aktivitas Bebas” Indonesia dan kendala “Kebijakan Satu Tiongkok” menciptakan ruang yang subur bagi pengembangan hubungan pragmatis antara Indonesia dan Taiwan. Jika Indonesia mematuhi Kebijakan Satu Tiongkok, itu mungkin menutup pintu untuk hubungan diplomatik formal dengan Taiwan (Ku, 2002). Namun, prinsip Free to Active membuka jendela bagi kerja sama substansial di bidang nonpolitik yang dapat mendukung pencapaian kepentingan nasional Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Golden Indonesia Vision 2045 (Rosani et al., 2025). Indonesia dapat secara oportunistik memanfaatkan berbagai penawaran dalam kerangka kerja NSP—mulai dari investasi teknologi hingga pengembangan sumber daya manusia—tanpa melanggar komitmen diplomatik formalnya terhadap Tiongkok (Mumtaz, 2025). Ini menciptakan model hubungan yang unik, di mana substansi kerja sama jauh melampaui formalitas status diplomatik.

Ada resonansi strategis yang unik antara

kebijakan “Aktif Bebas” Indonesia dan filosofi NSP Taiwan yang berpusat pada rakyat. Keduanya bertemu di titik pertemuan diplomasi pragmatis yang secara sadar menghindari jebakan politik kekuatan besar. Di satu sisi, Indonesia aktif mencari mitra pembangunan yang tidak memaksakan pilihan geopolitik dan tidak menyeretnya ke dalam persaingan AS-China (Laksmiana, 2022). Di sisi lain, Taiwan, menyadari keterbatasannya dalam bersaing secara militer atau diplomatik, dengan sengaja merancang NSP sebagai kebijakan non-konfrontatif, berfokus pada keuntungan bersama di tingkat masyarakat, dan secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak memiliki agenda tersembunyi (Melkis et al., 2025). Pendekatan yang tulus dan berorientasi pada kemitraan ini sangat sesuai dengan kebutuhan strategis Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan NSP di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh apa yang ditawarkannya (investasi, beasiswa, teknologi), tetapi yang lebih penting, oleh bagaimana hal itu disampaikan—melalui saluran non-politik yang menghormati, menyelaraskan, dan tidak mengancam postur kebijakan luar negeri Indonesia yang independen. Ini adalah penyelarasan strategis yang disengaja dan merupakan kunci keberlanjutan hubungan antara kedua belah pihak.

Kerja Sama Ekonomi

Pilar kolaborasi ekonomi merupakan fondasi utama dalam hubungan Indonesia-Taiwan di bawah kerangka kerja NSP. Sejak diluncurkan pada tahun 2016, kerja sama ekonomi kedua belah pihak telah menunjukkan tren pertumbuhan yang solid, yang mencerminkan saling ketergantungan yang semakin dalam. Data volume perdagangan bilateral merupakan indikator utama penguatan hubungan ini. Pada tahun 2021, total perdagangan mencapai \$10,96 miliar, peningkatan signifikan lebih dari 61% dari \$6,79 miliar pada tahun 2020 (CNA, 2022). Angka ini terus meningkat hingga mencapai lebih dari \$14 miliar pada 2022, menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang terbesar ke-13 Taiwan (China (Taiwan), 2023). Proyeksi menunjukkan bahwa tren positif ini akan terus berlanjut, dengan potensi melampaui angka sebelumnya di tahun-tahun mendatang (Pradana, 2024).

Dari sisi investasi, Taiwan secara konsisten memposisikan diri sebagai salah satu sumber utama Penanaman Modal Asing (FDI) di Indonesia (Mumtaz, 2025). Realisasi investasi menunjukkan komitmen jangka panjang investor Taiwan. Selama periode 2019 hingga semester I-2025, total realisasi investasi dari Taiwan mencapai \$1,9 miliar, tersebar di 7.170 proyek (Latif, 2025). Investasi ini tidak hanya mendatangkan modal tetapi juga menciptakan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, dengan penyerapan tenaga kerja

mencapai 100.958 orang di lima provinsi besar (Latif, 2025). Pada kuartal III-2017 saja, realisasi investasi tercatat sebesar \$41,3 juta pada 99 proyek (Sidik, 2017). Data lain menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, total realisasi investasi Taiwan mencapai \$926,9 juta, menempatkannya di urutan ke-15 di antara sumber FDI (Donnal Putera, 2017).

Investasi Taiwan di Indonesia terkonsentrasi pada sektor industri strategis yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional Indonesia. Lima provinsi utama yang menjadi tujuan investasi adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah (Pramudyani, 2019). Sektor-sektor yang paling diminati oleh investor Taiwan termasuk industri padat karya dan teknologi menengah, seperti karet dan plastik, tekstil, industri kimia dan farmasi, barang logam, dan elektronik, peralatan medis dan listrik (Donnal Putera, 2017). Kerja sama ekonomi ini telah memberikan dampak positif yang terukur bagi ekonomi makro Indonesia. Studi menunjukkan bahwa peningkatan kerja sama dengan Taiwan berkorelasi dengan peningkatan PDB, tingkat konsumsi, baik swasta maupun publik, dan investasi secara keseluruhan (Silitonga et al., 2019). Bagi Taiwan, NSP berfungsi sebagai instrumen penting untuk diversifikasi ekonomi, sebuah strategi yang menjadi semakin mendesak di tengah ketegangan dalam perang dagang AS-Tiongkok dan upaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada pasar Tiongkok (Mumtaz, 2025). Indonesia, dengan populasi yang besar dan pasar domestik yang kuat, menawarkan basis produksi alternatif dan tujuan investasi yang sangat strategis bagi perusahaan Taiwan (Sidik, 2017).

Hubungan ekonomi yang semakin erat ini telah memunculkan dinamika yang melampaui statistik belaka. Saling ketergantungan ekonomi yang mendalam secara efektif menciptakan “konstituen domestik untuk stabilitas” (James, 2015) di kedua belah pihak, yang berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap potensi guncangan politik eksternal. Di Indonesia, lebih dari 2.000 perusahaan Taiwan telah berinvestasi, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja (Elisabeth, 2014, hlm. 99). Pengusaha, manajer, dan pekerja di perusahaan-perusahaan ini, bersama dengan jaringan pemasok lokal mereka, memiliki kepentingan ekonomi yang tulus dan langsung dalam menjaga hubungan yang stabil dan saling menguntungkan dengan Taiwan. Kelompok ini secara inheren akan menentang kebijakan apa pun yang dapat mengganggu iklim investasi dan perdagangan. Di sisi lain, di Taiwan, investor yang telah melakukan investasi signifikan di Indonesia telah menjadi kelompok lobi yang kuat yang mendorong pemerintah untuk melanjutkan dan memperkuat NSP (Rajczyk, 2020). Jaringan kepentingan ekonomi yang saling terkait ini, termasuk investor, eksportir, importir, dan

pekerja, menciptakan penyangga yang substansial. Misalkan ada tekanan politik dari Beijing agar Jakarta mendinginkan hubungannya dengan Taipei. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan dengan cermat dampak negatif terhadap pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial di dalam perbatasannya sendiri. Dengan demikian, ketergantungan ekonomi ini secara efektif meningkatkan biaya politik bagi siapa saja yang berusaha mengganggu hubungan, sehingga meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan kemitraan non-diplomatik ini.

Kerja Sama Dalam Pendidikan Dan Pertukaran Bakat

Pilar pertukaran sumber daya manusia di NSP telah mendorong interaksi intensif antara Indonesia dan Taiwan, terutama di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Namun, analisis mendalam menunjukkan adanya fenomena hubungan asimetris timbal balik (Effendi, 2025). Asimetri ini diwujudkan dalam dua dimensi utama: mobilitas mahasiswa dan fokus penelitian akademik. Dari segi mobilitas, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Taiwan jauh melebihi jumlah mahasiswa Taiwan di Indonesia. Pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ketiga di antara negara-negara yang paling banyak mengirim siswa ke Taiwan dari negara-negara NSP, dengan pangsa 22,7%, setelah Malaysia (32,2%) dan Vietnam (25%). Sebaliknya, data menunjukkan bahwa pada tahun 2014, tidak ada siswa Taiwan yang tercatat belajar di Indonesia, dan secara umum, negara-negara NSP hanya menarik 4,25% dari total siswa Taiwan yang belajar di luar negeri (Effendi, 2025).

Asimetri yang lebih halus namun signifikan terlihat dalam fokus penelitian mahasiswa. Sebuah studi yang menganalisis topik penelitian dari tahun 2016 hingga 2021 menemukan bahwa mahasiswa Indonesia yang meneliti Taiwan cenderung fokus pada isu-isu minim, yaitu, hubungan lintas selat dan pekerja migran Indonesia (Effendi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi dan pemahaman akademis di kalangan mahasiswa Indonesia Taiwan tetap terbatas, terutama dibentuk oleh masalah konflik geopolitik dan perburuan. Sebaliknya, siswa Taiwan menunjukkan minat penelitian yang jauh lebih luas dan beragam di Indonesia, yang mencakup topik-topik seperti politik dalam negeri, pendidikan, pekerja migran, dan komunitas Tionghoa Indonesia. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa, meskipun Taiwan telah berhasil menarik minat mahasiswa Indonesia, Taiwan belum menjadi subjek diskusi akademik yang kaya dan multidimensi di Indonesia.

Untuk mendorong mobilitas siswa, Taiwan secara aktif menggunakan berbagai instrumen diplomasi pendidikan. Program beasiswa seperti

Beasiswa MOFA Taiwan menawarkan tunjangan bulanan yang kompetitif sebesar NT \$ 33,000 untuk program sarjana/pascasarjana untuk menarik talenta terbaik dari luar negeri (MOFA, 2022). Selain itu, pendirian Taiwan Education Centres di beberapa kota di Indonesia berfungsi sebagai garda terdepan untuk promosi dan informasi, memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerja sama antar universitas, dan menyelenggarakan pameran pendidikan yang selalu menarik minat yang signifikan dari calon mahasiswa Indonesia (Tonny, 2024a). Inisiatif ini merupakan perwujudan dari strategi *soft power* yang bertujuan tidak hanya untuk menarik talenta untuk mengatasi masalah brain drain di Taiwan, tetapi juga untuk membangun jaringan alumni yang loyal dan berpengaruh di Indonesia di masa depan (Krisna, 2019).

Di luar ranah akademik, pilar konektivitas manusia yang paling signifikan adalah kehadiran Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan jumlah penduduk melebihi 250.000, komunitas pekerja migran bukan hanya sekelompok pekerja, tetapi jembatan demografis dan sosial yang vital antara kedua komunitas (Redaksi, 2023). Menyadari pentingnya komunitas ini, KDEI di Taipei memainkan peran sentral yang melampaui fungsi konsuler biasa. KDEI tidak hanya memberikan perlindungan penting, seperti membantu kasus hukum, menangani pekerja migran yang sakit parah, dan pemulangan mayat, tetapi juga secara proaktif melakukan program pemberdayaan (KDEI, 2020). Inisiatif seperti pemasaran digital, literasi digital, dan pelatihan kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pekerja migran, mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik (KDEI, 2024). KDEI juga terus bersinergi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memperkuat tata kelola penempatan dan perlindungan, termasuk mendorong skema penempatan yang lebih adil dan memangkas biaya yang tidak perlu (KDEI, 2025).

Kesenjangan dalam pertukaran akademis menunjukkan “kesenjangan kekuatan lunak” yang sangat penting bagi Taiwan. Diplomasi pendidikan Taiwan telah berhasil dalam tahap keterlibatan, menarik orang untuk datang dan belajar, tetapi masih berjuang pada tahap membentuk wacana, yang melibatkan pembentukan perspektif dan wacana yang lebih dalam tentang Taiwan di kalangan intelektual Indonesia (Effendi, 2025). Program formal seperti pusat studi dan beasiswa memiliki jangkauan terbatas. Di sinilah peran komunitas pekerja migran yang berdaya menjadi sangat strategis. Ketika lebih dari 250.000 pekerja migran, yang tersebar di seluruh Taiwan dan mengalami kehidupan sehari-hari secara langsung, diberi kapasitas tambahan melalui pelatihan

keterampilan seperti pemasaran digital, mereka tidak hanya meningkatkan prospek ekonomi pribadi mereka (Redaksi, 2023). Mereka juga menjadi duta akar rumput yang paling otentik. Melalui media sosial dan komunikasi dengan keluarga di rumah, mereka menyebarkan narasi pribadi yang kuat tentang masyarakat, demokrasi, etos kerja, dan kehidupan di Taiwan. Narasi pengalaman yang jujur dan langsung ini berpotensi menjadi jauh lebih persuasif dan memiliki jangkauan yang lebih luas daripada wacana akademis formal. Dengan demikian, investasi dalam program pemberdayaan PMI tidak hanya merupakan kewajiban perlindungan, tetapi juga strategi *soft power* jangka panjang dan berbiaya rendah yang sangat efektif dalam mengisi kesenjangan pemahaman dan membangun afinitas sejati di tingkat masyarakat.

Kerja Sama Budaya Dan Pariwisata

Di luar pilar ekonomi dan pendidikan, NSP secara cerdas memanfaatkan dimensi budaya dan pariwisata untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan Indonesia. Salah satu pendekatan yang paling unik dan strategis adalah diplomasi warisan Austronesia. Dengan menyoroti kesamaan keturunan Austronesia yang dimiliki oleh masyarakat adat Taiwan dan sebagian besar Indonesia, Taiwan membingkai ulang hubungannya dengan Indonesia atas dasar identitas bersama yang lebih mendasar (Mumtaz, 2025). Pendekatan ini secara efektif melampaui narasi relasional yang semata-mata didasarkan pada kepentingan ekonomi atau politik kontemporer. Selain itu, langkah ini merupakan manuver *soft power* yang halus untuk membedakan identitas Taiwan dari narasi budaya Tiongkok yang dominan yang dipromosikan oleh RRT (Rawnsley, 2012). Dengan menekankan akar Austronesianya, Taiwan memposisikan dirinya sebagai entitas yang memiliki warisan budaya yang unik dan beragam, yang sangat beresonansi dengan identitas nasional multikultural Indonesia.

Sejalan dengan pendekatannya yang berpusat pada manusia, Taiwan telah mengidentifikasi dan mengembangkan sektor pariwisata yang secara khusus menargetkan pasar Indonesia: pariwisata ramah Muslim. Menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Taiwan secara sadar dan sistematis berinvestasi dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif (Melkis et al., 2025). Upaya ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk memfasilitasi proses sertifikasi halal untuk restoran dan produk makanan, menyediakan fasilitas ibadah di tempat umum dan tempat wisata, serta secara aktif mempromosikan Taiwan sebagai tujuan yang aman dan nyaman bagi wisatawan Muslim (Setyaningsih, 2022). Inisiatif ini menunjukkan pemahaman yang mendalam dan canggih tentang

demografi, nilai, dan preferensi pasar Indonesia, yang jauh melampaui pendekatan pariwisata generik.

Keberhasilan strategi pariwisata ramah Muslim ini terkait erat dengan peran penting diaspora Indonesia dan komunitas migran di Taiwan. Mereka tidak hanya menjadi target pasar awal, tetapi juga menjadi fasilitator dan jembatan budaya yang tak ternilai (Setyaningsih, 2022). Migran Indonesia memperkenalkan rasa dan standar makanan halal kepada masyarakat dan pengusaha lokal Taiwan (Setyaningsih & Fuady, 2025). Mereka membantu menjembatani kesenjangan budaya dan komunikasi antara pebisnis pariwisata Taiwan dan kebutuhan spesifik wisatawan Muslim (Rudolf Yuniarto, 2015, 2016). Dalam banyak kasus, mereka juga terlibat langsung dalam proses konsultasi dan sertifikasi halal, memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar yang diharapkan (Setyaningsih, 2022). Peran ganda komunitas migran sebagai konsumen dan produsen budaya menciptakan siklus positif yang mempercepat perkembangan industri pariwisata halal di Taiwan.

Perkembangan wisata halal di Taiwan dapat dilihat sebagai tindakan cangguh nation branding (Munandar & Fahrurrozi, 2025). Ini bukan hanya strategi untuk menuai keuntungan ekonomi dari pasar yang besar, tetapi pernyataan nilai yang kuat di panggung global. Dengan secara aktif berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan halal, Taiwan mengirimkan pesan yang jelas bahwa masyarakat mayoritas non-Muslimnya terbuka, toleran, dan mampu mengakomodasi dan menghormati praktik keagamaan kelompok minoritas dengan tulus. Pesan inklusivitas ini memiliki resonansi yang mendalam di Indonesia dan dunia Muslim yang lebih luas. Tindakan ini secara efektif membangun citra Taiwan sebagai negara yang progresif, modern, dan demokratis, yang dapat berfungsi sebagai kontras implisit dengan narasi lain yang mungkin kurang toleran di kawasan tersebut. Ini adalah bentuk kekuatan lunak yang sangat efektif, karena menumbuhkan afinitas dan kekaguman berdasarkan nilai-nilai bersama seperti rasa hormat dan toleransi, bukan hanya pada transaksi ekonomi. Melalui pariwisata halal, Taiwan tidak hanya mempromosikan destinasi wisatanya tetapi juga meningkatkan citranya sebagai mitra global yang bertanggung jawab dan berharga, sehingga memperkuat posisinya di mata masyarakat Indonesia dan dunia (Pradana, 2024).

Tantangan Dalam Hubungan Indonesia–Taiwan

Meskipun hubungan Indonesia–Taiwan menunjukkan perkembangan yang positif dalam bidang ekonomi, pendidikan, tenaga kerja, dan pertukaran budaya, keberlanjutan hubungan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan struktural.

Tantangan pertama adalah keterbatasan diplomatik yang bersumber dari penerapan Kebijakan Satu Tiongkok (*One China Policy*) oleh Indonesia (N. T. Elisabeth, 2023; Ku, 2002). Sebagai negara yang mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah mewakili Tiongkok, Indonesia tidak dapat menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Kondisi ini membatasi ruang kerja sama pada sektor-sektor non-politik dan menyebabkan berbagai bentuk interaksi bilateral harus dilakukan melalui mekanisme tidak resmi, seperti KDEI di Taipei dan Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta.

Tantangan kedua berkaitan dengan meningkatnya persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Posisi Indonesia yang mengedepankan prinsip politik luar negeri “Bebas dan Aktif” mengharuskan pemerintah untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan seluruh aktor utama di kawasan (Indah & Ali, 2025). Dalam konteks ini, setiap peningkatan kerja sama Indonesia–Taiwan berpotensi dipersepsikan secara sensitif oleh Beijing. Oleh karena itu, Indonesia harus terus mengelola hubungan dengan Taiwan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa kerja sama tersebut memiliki dimensi politik yang bertentangan dengan komitmennya terhadap Kebijakan Satu Tiongkok.

Tantangan ketiga adalah masih adanya ketimpangan dalam hubungan antarmasyarakat (Achmad, 2017; Paulus, 2024). Meskipun jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan dan pekerja migran Indonesia terus meningkat, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap Taiwan masih relatif terbatas dan sering kali hanya dikaitkan dengan isu pekerja migran atau konflik lintas selat. Sebaliknya, minat akademik Taiwan terhadap Indonesia cenderung lebih beragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas diplomasi publik dan diplomasi pendidikan Taiwan masih menghadapi hambatan dalam membangun pemahaman yang lebih komprehensif di Indonesia.

Selain itu, keberlanjutan hubungan ekonomi juga menghadapi tantangan berupa perubahan dinamika ekonomi global, persaingan investasi dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, serta ketidakpastian geopolitik yang dapat memengaruhi arus perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, keberhasilan hubungan Indonesia–Taiwan pada masa mendatang tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan kedua pihak dalam mengelola berbagai keterbatasan politik, meningkatkan konektivitas masyarakat, serta menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Kesimpulan

Kesimpulannya, tidak diragukan lagi bahwa Indonesia secara signifikan memposisikan posisinya di bawah NSP, yang menampilkan lokasi strategisnya dalam struktur regional Indo-Pasifik dan niat Taiwan dalam hubungan eksternal. Praktik mewujudkan NSP menunjukkan hubungan Indonesia-Taiwan telah berhasil secara signifikan di banyak bidang, termasuk kerja sama ekonomi dengan meningkatnya tingkat saling ketergantungan. Lebih lanjut, kerja sama pendidikan dan pertukaran talenta telah berkontribusi pada pembentukan hubungan yang langgeng di samping pertukaran budaya dan pengembangan pariwisata. Meskipun demikian, hambatan struktural masih tetap ada dalam konteks kendala diplomatik dari OCP, lanskap persaingan strategis, dan beberapa keterbatasan dalam mempromosikan kebijakan. Perpaduan realisme dan teori kekuatan lunak menunjukkan konsistensinya dengan topik penelitian. Pendekatan terintegrasi ini membantu mengklarifikasi logika realistis Taiwan dalam mengejar kepentingan dan keamanan secara paralel dengan memperluas pengaruhnya melalui saluran nonpolitik. Studi ini berkontribusi untuk mengidentifikasi signifikansi strategis dan keberlanjutan Indonesia dalam NSP. Selain itu, beberapa implikasi kebijakan diusulkan untuk Indonesia dan Taiwan.

Dalam hal Indonesia, keterlibatan mendalam dalam NSP membawa berbagai kepentingan berkelanjutan bagi negara ini tentang ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia. Namun, manajemen dan pengendalian yang bijaksana sangat penting, terutama sejalan dengan persaingan strategis regional. Pemerintah Jakarta berwenang untuk mempertahankan kemandirian dan proaktivitasnya serta memanfaatkan kerja sama dengan Taiwan sebagai saluran tambahan untuk mendiversifikasi kemitraan di berbagai industri, pelatihan talenta, transfer teknologi, dan kualitas tenaga kerja. Penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan untuk memoderasi program kerja sama non-politik dan memastikan transparansi, efektivitas, dan pemanfaatan yang selaras dengan prioritas nasional seperti Visi Indonesia Emas 2045. Komunitas pekerja migran dan jaringan alumni Indonesia di Taiwan perlu dimanfaatkan sebagai sumber hubungan sosial-intelektual untuk tujuan mentransformasikan pertukaran antarmasyarakat menjadi nilai-nilai pembangunan jangka panjang. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk memperoleh keuntungan dari pendorong sosial-ekonomi tanpa melanggar komitmen diplomatik yang ada.

Mewarisi warisan kepresidenan Tsai, pemerintahan Lai Ching-te perlu memposisikan Indonesia sebagai mitra prioritas. Sikap ini berakar pada skala pasar Indonesia yang diakui dan signifikansi

strategisnya di Indo-Pasifik. Terkait kebijakan, Taiwan diberi wewenang untuk tetap mudah didekati tanpa konfrontasi, yang menyoroti interaksi yang fleksibel, sehingga menghindari ketegangan geopolitik yang tidak terduga yang memengaruhi kedua belah pihak. Dalam proses implementasi NSP, Taiwan dapat membina koneksi interdisipliner dan meningkatkan konsistensi kebijakan di samping berinvestasi lebih banyak pada keunggulan kekuatan lunak seperti pendidikan, pelatihan talenta, pertukaran budaya, dan pengembangan pariwisata. Memanfaatkan pembangunan jaringan sosial-akademik-perusahaan jangka panjang merupakan katalis untuk membangun bentuk-bentuk interaktif yang melampaui batas diplomasi resmi. Dinamika ini tidak hanya memperkuat kehadiran Taiwan yang stabil terhadap Indonesia, tetapi juga mendorong adaptabilitas strategis pulau ini di kawasan yang bergejolak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemimpin Redaksi Dr. Yusa Djuyandi, S.IP., M.SI., atas bantuannya dalam menyunting versi bahasa Indonesia, karena bahasa utama penulis bukanlah bahasa Indonesia.

Referensi

- About Cirebon. (2023, December 2). KDEI Taipei Berkomitmen Lindungi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. About Cirebon. <https://aboutcirebon.id/kdei-taipei-berkomitmen-lindungi-pekerja-migran-indonesia-di-taiwan/>
- Achmad, Z. (2017). Peluang dan Tantangan Pekerja Migran Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. INA-Rxiv. <https://doi.org/10.31227/osf.io/9twcv>
- Amarulla, O., Rayindra, A., & Abdiyan, S. H. (2020). Means of Indonesian Maritime Defense Strategy in Sea Control on the Indonesian Strategic Straits to Support Total Defense and Security System. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 6(3), 507. <https://doi.org/10.33172/jp.v6i3.1130>
- Andri, D. P. (2017, September 11). Genjot Investasi Taiwan, Standard Chartered Gandeng BKPM. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2017/11/09/073000826/genjot-investasi-taiwan-standard-chartered-gandeng-bkpm>
- Arias Valencia, M. M. (2022). Principles, Scope, and Limitations of the Methodological

- Triangulation. *Investigacion y Educacion En Enfermeria*, 40(2).
<https://doi.org/10.17533/udea.tee.v40n2e03>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The Use of Triangulation in Qualitative Research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547.
<https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- China (Taiwan), M. of F. A., Republic of. (2023, November 24). Taiwan deepens relationship with Indonesia. Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). *Taiwan Today*.
<https://taiwantoday.tw/economics/top-news/245152/taiwan-deepens-relationship-with-indonesia>
- CNA. (2022, January 20). Indonesian office, bank's MOU to boost local trade. *Taipei Times*.
<https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2022/01/20/2003771693>
- CRIF. (2024, December 19). Taiwan's New Southbound Policy Strategy: Strengthening Investment and Economic Partnerships in Indonesia. CRIF Asia.
<https://www.id.crifasia.com/resources/industry-insights/taiwan-s-new-southbound-policy-strategy-strengthening-investment-and-economic-partnerships-in-indonesia/>
- Dama, R. A., & Ali, M. (2022). The Complex Interdependency Between Taiwan and Indonesia Through the Implementation of New Southbound Policy. *Proceedings of the International Conference on Public Organization (ICONPO 2021), Advances in Economics, Business and Management Research*, 209.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220209.056>
- Dimas, A., Dewa, I., Rusdy, S., & Muhammad, A. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3, 1–9.
<https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Doeser, F., & Frantzen, F. (2022). The strategic and realist perspectives: An ambiguous relationship. *Journal of Strategic Studies*, 45(6–7), 918–941.
<https://doi.org/10.1080/01402390.2020.1833860>
- Elisabeth, A. (2014). Indonesia-Taiwan economic cooperation arrangement: Is it feasible? (T. Chaw-Hsia, Ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Elisabeth, N. T. (2023). One China Policy dan Dampaknya Bagi Hubungan Indonesia-Taiwan. *Lex Prudentium Law Journal*, 2(1), 1–13.
<https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v2i1.2>
- Emirza, A. S. (2025). Tacit Understandings: Explaining Maritime Southeast Asia's Restraint towards China in the Post-Cold War Period [Doctoral Thesis]. Australian National University.
- Evan, A. L. (2022). Not the Deterrence You're Looking For: Indonesia and Northeast Asian Security. In T. Drew & C. Byron (Eds.), *Detering Conflict and Preserving Peace in Asia* (pp. 47–49). Centre on Asia and Globalisation.
https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/cag/detering-conflict-and-preserving-peace-in-asia_dec2022.pdf#page=8.10
- Himawan, B. P. (2022). Soft Power and Taiwan's New Southbound Policy [MOFA Taiwan fellowship]. Taiwan's National Central Library.
- Indah, D. N. S., & Ali, M. (2025). Keterlibatan Indonesia Dengan Brics: Antara Kebijakan Luar Negeri Yang Bebas Dan Aktif Serta Keterlibatan Strategis Yang Terbatas. *Jurnal Dinamika Global*, 10(2), 374–396.
<https://doi.org/10.36859/jdg.v10i2.4627>
- Ismah, R. (2020). Strategi Maritime Silk Road China dan dampaknya pada Keamanan Maritim Indonesia. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPS)*, 2(2), 31–50.
<https://doi.org/10.29303/ijps.v2i2.44>
- Jackie, S., Caitlin, C., & Laura, B. (2020). Developing systematic search methods for the library literature: Methods and analysis. *The Journal of Academic Librarianship*, 46(5), 102190.
<https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102190>
- James, M. R. (2015). Two Concepts of Constituency. *The Journal of Politics*, 77(2), 381–393.
<https://doi.org/10.1086/679494>
- Juan, C. M., Gilang, N. A., & Windy, D. (2025). Mapping Out Taiwan-Indonesia Bilateral Cooperation: Establishing Interdependence on People-to-People Connectivity. *Indonesian Journal of Social Science Research*, 6(1), 95–104.
<https://doi.org/10.11594/ijssr.06.01.09>
- Karl, L. C. L. (2025). Soft power in Taiwan's New Southbound Policy (NSP): Assessing the Flagship Program for Industrial Innovation and Cooperation (IIC). *International Journal of Asia Pacific Studies*, 21(2), 279–296.
<https://doi.org/10.21315/ijaps2025.21.2.14>
- KDEI. (2020, June 9). Tugas Pokok dan Fungsi. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan.
<https://www.kdei-taipei.org/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-3.html>
- KDEI. (2024, May). Pelatihan Digital Marketing untuk Pekerja Migran Indonesia. Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taiwan.
<https://www.kdei-taipei.org/event/pelatihan->

[digital-marketing-untuk-pekerja-migran-indonesia-27.html](https://doi.org/10.62771/pk. V3i2.35)

- KDEI. (2025, October 23). Pelindungan dan Penempatan PMI di Taiwan Kian Diperkuat, Kepala KDEI Taipei Temui Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taiwan. <https://www.kdei-taipei.org/news/pelindungan-dan-penempatan-pmi-di-taiwan-kian-diperkuat-kepala-kdei-taipei-temui-menteri-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-2766.html>
- Klaus, K. (2019). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Krisna, A. R. (2019). Strategi Internasionalisasi Sektor Pendidikan Pemerintah Taiwan dalam Era New Southbound Policy [Doctoral Thesis, Universitas Airlangga]. https://repository.unair.ac.id/81931/3/JURNAL_Fis.HI.01%2019%20Kri%20s.pdf
- Ku, S. C. Y. (2002). Indonesia's Relations with China and Taiwan: From Politics to Economics. Asian Perspective, 26(4), 227–256. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1353/apr.2002.0009>
- Kuik, C.-C. (2022). Southeast Asian States and ASEAN: A Center of Courtships and Cooperation. In L. S. David (Ed.), International relations of Asia (Third edition). Rowman & Littlefield.
- Latif, A. (2025, August 13). Investasi Taiwan di Indonesia Tembus USD 1,9 Miliar Sejak 2019. kumparanBISNIS. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/investasi-taiwan-di-indonesia-tembus-usd-1-9-miliar-sejak-2019-25dv4C4nDcU>
- Lyhne, C. N., Thisted, J., & Bjerrum, M. (2025). Qualitative content analysis—framing the analytical process of inductive content analysis to develop a sound study design. Quality & Quantity, 59(6), 5329–5349. <https://doi.org/10.1007/s11135-025-02220-9>
- Meydan, C. H., & Akkaş, H. (2024). The Role of Triangulation in Qualitative Research (pp. 101–132). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3306-8.ch006>
- MOFA. (2022, March 18). MOFA Taiwan Scholarship. Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). <https://en.mofa.gov.tw/cp.aspx?n=1325>
- Mumin, C., & Chattaraj, S. (2017). New Southbound Policy in India and South Asia. Prospect Journal, (8), 35–62.
- Munandar, S. A., & Fahrurrozi, F. (2025). Halal Taiwan application: Facilitating access to products for minority Muslim communities. International Journal of Halal Industry, 1(1), 100–116. <https://doi.org/10.20885/IJHI.vol1.iss1.art7>
- Nye, J. S. (2023). Soft Power. In J. S. Nye (Ed.), Soft Power and Great-Power Competition: Shifting Sands in the Balance of Power Between the United States and China (pp. 3–15). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0714-4_1
- Paulus, R. Y. (2015). Culture, Structure, and Co-Ethnic Relations of Indonesians Migrant Entrepreneurship in Taiwan. Asia-Pacific Social Science Review, 15(2), 56–74. <https://doi.org/10.59588/2350-8329.1056>
- Paulus, R. Y. (2016). “Beyond Ethnic Economy”: Religiosity, Social Entrepreneurship, and Solidarity Formation of Indonesian Migrants in Taiwan. Makara Human Behavior Studies in Asia, 20(1), 1–14. <https://doi.org/10.7454/mssh.v20i1.3482>
- Paulus, R. Y. (2024). Hidup dalam Kesenjangan: Paradox Migran Baru Asal Tiongkok (Xinyimin) dengan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Identitas, 34–59. <https://doi.org/10.66109/jid.vi.11>
- Pradana, H. A. (2024, November 27). Indonesia's part in the southbound framework. Taipei Times. <https://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2024/11/27/2003827539>
- Pramudyani, Y. D. (2019, January 17). BKPM nilai pembukaan kantor TVA tingkatkan investasi. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/788518/bkpm-nilai-pembukaan-kantor-tva-tingkatkan-investasi>
- Qhirani, A. R. L., & Imam, F. N. (2025). Peran Strategis Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Maritim di Kawasan Asia Tenggara. Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi, 2(3), 44–59. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.918>
- Rafida, M. (2025). Shared Tongues, Shared Futures: Rethinking Taiwan-Indonesia Cultural Ties under the New Southbound Policy+. The New Southbound Policy: Leveraging Indonesia-Taiwan Ties, 39–46. <https://www.habibiecenter.or.id/publikasi-buku-dan-laporan-penelitian>
- Rajczyk, R. (2020). Framing the New Southbound Policy in Western Media. Studia Polticae Universitatis Silesiensis, 29, 25–48. <https://doi.org/10.31261/spus.9572>
- Ratih, K. (2023). Unpacking Taiwan's ‘People-

- Centred' New Southbound Policy in Indonesia: A Transnational Perspective. *International Journal of China Studies*, 14(2), 75–102.
- Rawnsley, G. (2012). Approaches to soft power and public diplomacy in China and Taiwan. *The Journal of International Communication*, 18(2), 121–135. (world).
<https://doi.org/10.1080/13216597.2012.695744>
- Rita, P. S. (2022). Indonesia–Taiwan Relationship Under the New Southbound Policy: A Perspective from Jakarta. In K. Yumi, H. Y. Alan, & L. T. Ju, *When East Asia Meets Southeast Asia* (pp. 257–283). World Scientific.
https://doi.org/10.1142/9789811250668_0010
- Rosani, M., Lestari, N., & Valianti, R. (2025). Transformation of Education to Welcome the Golden Generation Of Indonesia 2045. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 10(1), 407–427.
<https://doi.org/10.31851/jmksp.v10i1.18895>
- Setyaningsih, R. P., & Fuady, A. H. (2025). Indonesian Migrants and the Development of the Halal Tourism Industry in Taiwan. *Diaspora Studies*, 18(2), 175–198.
<https://doi.org/10.1163/09763457-bja10147>
- Sidik, S. (2017, August 11). Sampai Kuartal III, Nilai Investasi Taiwan di Indonesia 41,3 Juta Dolar AS. *TribunNews.com*.
<https://www.tribunnews.com/bisnis/2017/11/08/taiwan-investasi-413-juta-dolar-as-kembangkan-industri-logistik>
- Silitonga, B., Rindayati, W., & Widyastutik, W. (2019). Impact of Indonesia-Taiwan Bilateral Cooperation on Indonesia Economy. *Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal*, 2(6), 1–18.
- Tang, C.-M. (2016). Taiwan's Challenges in the Changing Landscape of Regional Security and Economy in the Asia-Pacific Region after the Cold War. *Studia z Polityki Publicznej*, 4(12)), 155–175.
<https://doi.org/10.33119/KSzPP.2016.4.7>
- Taquella, T. G. P. (2024). Indonesia's Role Toward the Pacific Region: A Case Study of Foreign Policy Under Thepresident Joko Widodo Administration [Master's Thesis, Thammasat University].
https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2023/TU_2023_6531090030_18875_28711.pdf
- Tonny, D. E. (2024a). Indonesian Online Media Coverage on New Southbound Policy and Its Implications to Taiwan's Public Diplomacy. In *Survey of Taiwan and New Southbound Policy From Indonesian Perspective* (pp. 135–158). UMM Press.
- Tonny, D. E. (2024b). Taiwan's Regional Identity under the New Southbound Policy. 8(1), 149–184. <https://doi.org/10.1163/24688800-20241329>
- Tonny, D. E. (2025). Reciprocal Asymmetric Relations in Taiwan's Education Diplomacy to Indonesia Under the New Southbound Policy. In Nawawi, A. N. Alami, J. Bautista, M. Aung-Thwin, D. Simandjuntak, & Y. E. Prasetyo (Eds.), *Managing Disruption and Developing Resilience for a Better Southeast Asia* (pp. 911–923). Springer Nature.
https://doi.org/10.1007/978-981-96-2116-3_64